

BAB IV

FAKTOR DETERMINAN CHINA MEMUTUSKAN MEMBANGUN PANGKALAN MILITER DI DJIBOUTI, AFRIKA TAHUN 2016

Bab ini merupakan ruang pembahasan secara teoritik atas pokok permasalahan yang diajukan penulis dalam karya skripsi berjudul **Kebijakan Pembangunan Pangkalan Militer China di Djibouti, Afrika Tahun 2016**. Secara mendalam penulis akan memberikan analisis- analisis untuk menjelaskan alasan substansial terkait mengapa China pada tahun 2016 memutuskan untuk membangun pangkalan militer pertamanya di Djibouti, Afrika. Teori Kebijakan Politik Luar Negeri dari William D. Coplin menjadi teori tunggal yang digunakan penulis untuk membaca, menjelaskan, dan menjawab terkait fenomena yang terjadi. Teori tersebut penulis gunakan sebagai alat untuk membuktikan hipotesis-hipotesis yang telah diajukan penulis dalam bab pertama. Model Kebijakan Politik Luar Negeri menjadi landasan yang penulis gunakan untuk menjawab faktor-faktor pendorong China sebagai aktor politik dalam membuat kebijakan politik luar negerinya. Terdapat tiga tinjauan yang akan dianalisis menggunakan teori tersebut yaitu, dalam perspektif konteks internasional, kondisi domestik politik Negara China, kondisi ekonomi dan militer negara China sebagai faktor determinan yang mendorong lahirnya efek politik yaitu, keputusan China untuk mambangun pangkalan militer pertamanya di Djibouti, Afrika sebagai suatu produk politik luar negeri. Dengan demikian, muara bab ini akan berlabuh pada terjawabnya alasan-alasan kongkrit China

dalam memutuskan untuk melakukan pembangunan pangkalan militer negaranya di Djibouti, Afrika pada tahun 2016.

A. Pengaruh Hegemoni Berbagai Kekuatan Global di Kawasan Geostrategis Djibouti, Afrika

Kondisi dunia internasional pasca dekade 1990-an atau secara konseptual dalam kajian hubungan internasional dikenal dengan era pasca perang dingin telah menciptakan transformasi baru secara dinamis pada struktur tatanan global. Tatanan yang bersifat unipolaritas pada dekade 1990-an telah berganti menuju struktur multipolaritas atau bahkan banyak penstudi yang menyebutnya sebagai era nonpolaritas sering dengan mulai tumbuh dan terlibatnya berbagai aktor hubungan internasional dengan berbagai tingkat kekuatannya (Muna, Adriana Elisabeth, Wuryandari, & Sriyanto, 2011, hal. 139). Namun, ditengah kompleksitas keterlibatan berbagai aktor global tersebut, sketsa struktur tatanan global tetap menjadi suatu lanskap yang dapat digambarkan secara jelas, termasuk dalam dimensi aktor global yang terlibat. China menjadi salah satu kekuatan aktor global yang pada waktu tersebut geliat dan pengaruhnya dapat diperhitungan tidak saja dalam skala regional, namun juga secara global. Begitu juga eksistensi ini masih terjaga hingga saat ini, di tengah kompleksitas hubungan internasional abad 21.

Berbagai literatur telah mendokumentasi perjalanan kemajuan China sebagai aktor global baik dalam dimensi militer, ekonomi, maupun politik. Dalam karya jurnal *The Rise and Fall of The Great Power in The Twenty-First Century* dengan fokus analisis *China's Rise and The Fate of America's*

Global Power, Stephen G. Brooks and Wiliam C. Wohlforth dari Harvard Collage menuturkan bahwa China telah menjadi salah satu aktor kekuatan militer global kedua setelah Amerika Serikat. Secara ekonomi China tumbuh menjadi aktor dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat dan hal ini membawa konsekuensi pada porsi China yang dapat menjadi aktor dengan kapasitas pengaruh besar di tatanan global (Jacques, 2013, hal. 1).

Berdasarkan pemaparan pada paragraf-paragraf sebelumnya tersebut, maka terdapat suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan dalam melihat dan menganalisis setiap perubahan, kemajuan, ataupun perilaku China sebagai aktor hubungan internasional. Hal tersebut ialah bahwa sebagai aktor global, China pasca dekade 1990-an telah menjadi aktor yang terlibat secara intens dalam berbagai interaksi dalam agenda internasional. Hal ini menjadi faktual dikarenakan pada akhir tahun 1980-an, Deng Xio Ping selaku presiden pada era tersebut mulai menerapkan suatu kebijakan baru bagi negaranya yaitu, kebijakan sistem pintu terbuka sebagai perubahan kebijakan tertutup yang diterapkan oleh China di panggung internasional dalam merepon berbagai isu global. Hal ini, telah membawa konsekuensi tunggal bahwasanya pertumbuhan, kemajuan dan perilaku China secara global dijalankan dengan cara yang berorientasi kerjasama internasional (Muna, Adriana Elisabeth, Wuryandari, & Sriyanto, 2011, hal. 49).

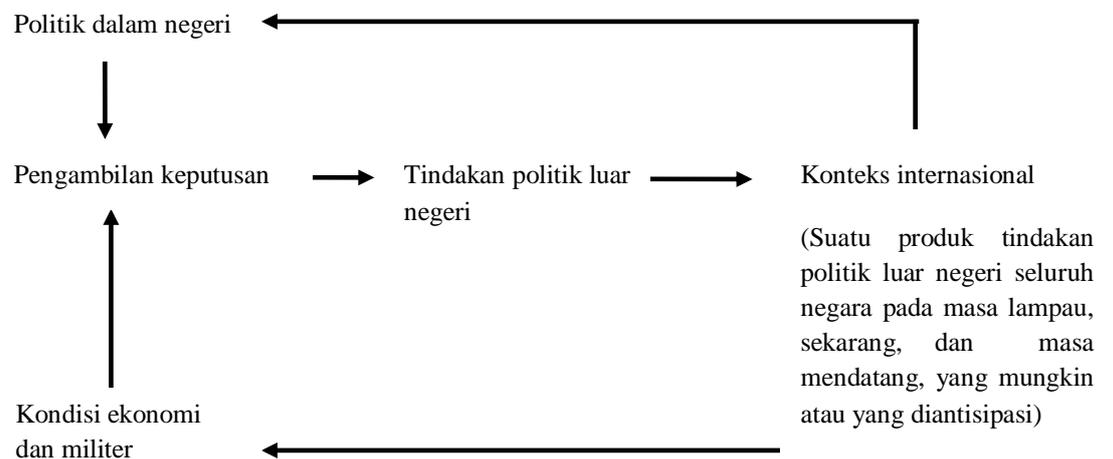
Pilihan kebangkitan China melalui jalur kerjasama internasional tersebut telah menyiratkan esensi bahwa pertumbuhan, kemajuan dan setiap

perilaku China ditatanan global akan sangat dipengaruhi oleh situasi-situasi internasional yang tengah terjadi, baik dalam konteks isu ataupun aktor hubungan internasional yang sedang bergerak secara dinamis di dalam lingkaran kepentingan China. Begitu halnya dalam menyoroti fenomena hubungan internasional yang menjadi topik bahasan utama dalam karya skripsi ini yaitu, terkait dengan kebijakan China dalam membangun pangkalan militer pertama untuk negaranya di Djibouti, Afrika pada tahun 2016. Keputusan China tersebut merupakan bagian dari sikap politik luar negeri China. Sebagai produk politik luar negerinya, tentunya keputusan tersebut bukanlah suatu keputusan murni yang tidak berlandaskan suatu alasan. Melainkan, keputusan tersebut merupakan cerminan dari berbagai pertimbangan strategis yang telah diolah China sehingga pada tahun 2016, China memutuskan untuk membangun pangkalan militer pertama bagi negaranya di kawasan global. Salah satu pertimbangan strategis tersebut tentu tidak akan terpisahkan dari adanya situasi-situasi internasional yang tengah terjadi di sekitar lingkaran kepentingan China di ranah global.

William D. Coplin dalam Teori Kebijakan Politik Luar Negerinya telah memberikan tekanan khusus terkait dinamika isu situasi internasional. Dalam teks besarnya, Coplin menyampaikan bahwa dalam membaca suatu kebijakan politik luar negeri suatu negara maka setidaknya terdapat tiga considerasi sebagai alat pendekatan pemahaman terkait determinan atau penyebab subjek negara untuk kemudian memutuskan suatu kebijakan politik luar negeri bagi negaranya. Tiga konsiderasi tersebut telah dijelaskan pada bab pertama

dalam karya skripsi ini. Namun, sebagai ruang pembahasan secara teoritik maka penulis akan menampilkan kembali asumsi-asumsi yang dibangun Coplin dalam Teori Kebijakan Politik Luar Negeri sebagai penegas instrumen yang penulis gunakan untuk mendeteksi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi China dalam memutuskan kebijakan politik luar negerinya pada tahun 2016 tersebut atas studi kasus pembangunan pangkalan militer.

Gambar 4.1 Model Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri William D. Coplin



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis Edisi Kedua (Coplin & Marbun, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal. 30).

Dalam model teorinya dan penjelasan implementasi yang telah Coplin paparkan dalam buku Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, suatu politik luar negeri merupakan produk keputusan negara atas berbagai pertimbangan strategis baik dalam aspek politik domestik negara yang mempengaruhi, aspek kondisi ekonomi dan militer negara yang mempengaruhi, serta aspek konteks internasional yang mempengaruhi. Dalam sub bab ini, akan

diberikan pembuktian secara analisis teoritis atas sikap China dalam memutuskan membangun pangkalan militer negaranya pada tahun 2016 di Djibouti, Afrika dalam tinjauan determinan konteks internasional dari William D. Coplin.

Coplin telah memberikan teks besar bahwa konteks internasional atau situasi internasional menjadi suatu aspek yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku negara sebagai aktor hubungan internasional. Dalam karya bukunya, Coplin tidak memberikan definisi secara luas atas konsep konteks internasional yang ia elaborasikan. Namun, Coplin setidaknya telah memberikan penekanan atas definisi konteks internasional sebagai suatu produk tindakan politik luar negeri dari seluruh negara baik yang terjadi pada era masa lampau, sekarang atau yang masa akan datang (Coplin & Marbun, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal. 30). Terdapat tiga elemen penting dalam membahas konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara yaitu, geografis, ekonomi, dan politik. Lingkungan internasional setiap negara sangat ditentukan pada lokasi wilayah yang diduduki dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negaranya dengan negara-negara lain (Coplin & Marbun, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal. 167). Oleh karena itu, dalam memberikan analisis terkait faktor determinan atau penyebab yang mendorong China dalam membuat kebijakan politik luar negeri berupa pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016. Penulis akan memberikan sorotan teoritik pada konteks internasioanl yang meliputi pembahasan atas tiga elemen tersebut.

Kebijakan pembangunan pangkalan militer yang telah mulai dibangun China pada 8 April 2016 di Djibouti, Afrika dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2017 tersebut, tentunya merupakan hasil dari suatu proses yang cukup panjang bagi China. 2014 menjadi tahun awalan bagi China untuk membuka dialog komunikasi dengan pemerintahan Djibouti dalam mengartikulasikan keinginannya dalam membangun suatu pangkalan militer negaranya di wilayah Djibouti. Artinya, terdapat situasi-situasi internasional yang telah mendorong China baik sebelum tahun 2014, ataupun setelahnya untuk kemudian China memutuskan kebijakan tersebut pada tahun 2016. Kaitannya dengan konteks internasional atau situasi internasional, maka sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan dalam bab pertama maka secara konteks internasional terdapat pengaruh dari adanya hegemoni berbagai aktor kuat global di kawasan Afrika sebagai kawasan subur bagi berjalannya roda ekonomi perdagangan China. Adanya hegemoni tersebut telah menciptakan suatu situasi kompetisi yang mengkhawatirkan bagi masa depan aktivitas China baik di Djibouti atau Kawasan Afrika secara luas.

Kaitannya dengan elemen geografis, keberadaan Djibouti, Afrika sebagai wilayah yang bernilai strategis tinggi dalam rute aktivitas ekonomi China telah mendorong China untuk mempertimbangkan keputusan negaranya dalam meningkatkan kemitraan strategis pada bidang militer di wilayah tersebut. Selain dalam bidang ekonomi, Djibouti memiliki kedudukan strategis bagi China baik dalam hal politik, ataupun militer. Sama halnya dengan suatu transformasi dalam hubungan internasional baik dalam aspek, isu ataupun aktor terlibat.

Kecenderungan kawasan kemitraan (geografis kemitraan) dalam pergerakan kerjasama internasional yang dioperasional oleh berbagai aktor negara-negara global juga mengalami transformasi secara signifikan. Hubungan kerjasama baik dalam bentuk bilateral ataupun multilateral pada awal pasca perang dingin, terlihat bahwasanya grafitasi kawasan Asia telah menjadi medan magnet bagi prioritas berbagai kebijakan kerjasama internasional dari berbagai aktor global khususnya bagi Amerika Serikat dan European Union (Langenhove, 2010, hal. 6). Menurut Luk Van Langenhove sebagai penstudi terkait peran aktor global di tengah pusaran interaksi mulipolar dan multilateral dari Belgia, kecenderungan kawasan kemitraan sangat erat kaitannya dengan isu strategis yang tengah tren di kawasan internasional. Isu yang bersifat ekonomi-sentris telah menjadi agenda internasional utama yang menyita perhatian aktor-aktor hubungan internasional (Salmon & Imber, 2008, hal. 5). Hal ini selaras dengan pendapat peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ganewati Wuryandari beserta kolega yang memaparkan bahwasanya transformasi global pasca perang dingin telah membawa atmosfer hubungan internasional yang lebih dominan beriklim ekonomi. Artinya, grafitasi kawasan kemitraan secara global sangta dipengaruhi oleh kebutuhan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Maka Tidaklah heran apabila narasi “*pivot to Asia-Pacific*” kemudian menjadi *headline* agenda internasional dari berbagai aktor global. Amerika Serikat menjadi slaa satu aktor global yang memberikan perhatian penuh atas segala dinamika yang terjadi di kawasan. Terlebih pada era pemerintahannya, Presiden Barack Obama menetapkan kawasan Asia Pasifik sebagai wilayah lingkaran

konsentris bagi negaranya dalam hal kemitraan ekonomi (Campbell & Andrews, 2013, hal. 5).

Grafitasi kecenderungan kawasan kemitraan tersebut, berkembang secara dinamis. Terdapat diaspora kawasan-kawasan baru yang menjadi gravitasi baru bagi berbagai aktor global untuk saling menanamkan pengaruh dan keterlibatannya baik secara politik, ekonomi dan militer bagi kelangsungan stabilitas masa depan negaranya masing-masing. Tanpa meninggalkan kawasan Asia Pasifik, cakupan kawasan kemitraan strategis mulai merambah di kawasan benua yang cukup lekat dengan identitas sebagai Kawasan Afrika (Rotberg, 2004, hal. 1). Dalam perspektif kekuatan asing global, Afrika merupakan kawasan dengan potensial ekonomi dan politik yang tinggi. Dalam perspektif ekonomi, arsitektur kawasan yang cenderung tampil sebagai *customer market* telah menjadi grafikasi baru dalam dunia ekspansi pertumbuhan ekonomi dari berbagai negara industri seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Rusia, Jepang, serta China sebagai aktor ekonomi global (Deloitte, 2014, hal. 3). Selain hal tersebut, terdapat berbagai narasi mengenai “*The Raising Africa*” sebagai potret potensial kawasan Afrika menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam mengukur kadar grafitasi keunggulan kawasan sebagai mitra kerjasama internasional di abad 21. Selain kecenderungan Djibouti dan Afrika sebagai sumber grafitasi baru global secara geopolitik, geografis Djibouti memiliki dua arti penting bagi keberlangsungan China sebagai aktor global yaitu,

1. Djibouti dalam Jalur Perdagangan dan Pelayaran Global

Secara geografis, Djibouti merupakan negara yang terletak di Tanduk Afrika, di persimpangan Teluk Aden-Suez Canal dan Laut Merah yang merupakan pintu masuk Laut Tengah (INDC, 2015, hal. 2). Lanskap geografis Djibouti tersebut memberikan konsekuensi pada arti penting Djibouti sebagai negara strategis baik secara regional maupun global. Pasalnya, kondisi riil yang menempatkan Djibouti menjadi negara kawasan Afrika yang berlokasi di wilayah Tanduk Afrika telah memberikan konsekuensi pada nilai strategisnya sebagai aset yang potensial baik bagi Djibouti, ataupun negara lain yang terlibat dalam kerjasama di wilayah Djibouti.

Tanduk Afrika (*Horn of Africa*) dikenal juga sebagai Timur Laut Afrika atau Semenanjung Somalia merupakan semenanjung di Afrika Timur yang menjorok beberapa ratus kilometer ke Laut Arab dan terletak di sebelah Selatan Teluk Aden (Jatmika, Hubungan Internasional di kawasan Afrika, 2016, hal. 63). Keberadaan geografis ini telah menempatkan Djibouti sebagai negara yang sangat strategis karena menjadi basis dari berbagai aktivitas pelayaran dan perdagangan global. Dalam laporan tertulisnya tertanggal 9 April 2016, lokasi tersebut merupakan wilayah pintu gerbang untuk menuju Terusan Suez. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Terusan Suez merupakan salah satu rute pelayaran dan perdagangan internasional tersibuk di dunia. Kaitannya dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional, China turut menjadi aktor terlibat dalam dua agenda besar global tersebut.

Hal tersebut dapat terlihat dari gambar di berikut ini yang menjelaskan adanya rute khusus yang telah dibangun China kaitannya dengan aktivitas perdagangan dan maritim global di jalur sutera.

Gambar 4.2 Jalur Ekonomi dan Maritim China secara Global



Sumber: Zofeen T. Ebrahim, *China's New Silk Road: What's In It For Pakistan?* (Ebrahim, 2015).

Selain, Djibouti berada pada salah satu titik rute pelayaran dan perdagangan maritim China sebagaimana telah terjelaskan sebelumnya. Keberlangsungan pelayaran dan perdagangan China sangat bergantung pada kawasan maritim di Negara Djibouti. Pasalnya, tercatat bahwa 20.000-25.000 kapal melintasi kawasan laut sekitar Djibouti dan melakukan transit pelayaran di Teluk Aden setiap tahunnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Djibouti memiliki wilayah yang bersinggungan langsung dengan Teluk Aden. Dari keseluruhan kapal pelayaran dan perdagangan internasional, 1400-

1600 kapal dari total tersebut ialah transportasi laut kepemilikan China. Kapal tersebut berupa kapal komersil dan non komersil. Oleh karena itu, China memiliki kepentingan kuat untuk menjaga keamanan jalur lalu lintas pelayaran kapal dari negaranya (Bo, 2013). Keputusan China untuk membangun pangkalan militer dengan bentuk suatu armada angkatan laut China menjadi relevan dengan kebutuhan China di wilayah tersebut. Tentu, secara situasi internasional yaitu, kedudukan Djibouti sebagai wilayah yang sangat penting bagi aktivitas pelayaran dan perdagangan China maka hal ini menjadi suatu pertimbangan kuat bagi China untuk pada tahun 2016 memutuskan membangun sebuah pangkalan militer negaranya tidak jauh dari Teluk aden tersebut.

2. Djibouti sebagai Pintu Masuk Kawasan Afrika

Dalam aspek aktivitas ekonomi, sektor transportasi menjadi andalan perekonomian nasional Djibouti. Sektor tersebut digerakkan Djibouti melalui mobilisasi transportasi dalam jasa pelabuhan, transit, dan jasa distribusi. Melalui aktivitas tersebut, Djibouti tumbuh menjadi pusat transportasi regional yang ada di kawasan Afrika. Operasional sektor transportasi telah memberikan keuntungan signifikan bagi Djibouti karena secara akumulatif, aktivitas tersebut telah memberikan kontribusi lebih dari 70 persen pendapatan negara berasal dari hal tersebut. Selain hal tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, Djibouti mulai membuka pintu investasi asing baik di zona pelabuhan, pariwisata, maupun konstruksi lebih luas di negaranya (Omar, 2015, hal. 3). Dalam perkembangannya, Djibouti telah

mengembangkan sektor jasa transportasinya untuk melayani pendistribusian logistik sub-benua yaitu, antara Afrika dengan Asia (Dawaleh & Styan, 2012, hal. 3). Oleh karena itu, Djibouti memiliki peran penting dalam perjalanan kemitraan China di kawasan Afrika ke depannya secara lebih efektif.

Mengkaji terkait fakta dasar Afrika, maka secara politik Afrika dapat dipahami sebagai kekuatan besar yang membawa 54 suara yang cukup berpengaruh pada keputusan global. Secara ekonomi, Afrika memiliki keanekaragaman sumber daya alam berlimpah dan bernilai yang tersebar di setiap negara kawasan seperti minyak mentah yang berlokasi di Libya, Chad, dan Angola. Kemudian produksi kopi dan teh di Kongo, dan lain sebagainya. Secara geostrategis, Afrika berada pada jalur sutera maritim yang menjadikannya sebagai kawasan penting bagi negara lain. Namun, sebagai kawasan yang berpotensi tinggi untuk menjadi negara tidak terpinggirkan tersebut, rupanya selama ini telah tercatat sebanyak 54 negara kawasan selalu berupaya memenuhi kebutuhan pangan negaranya dengan bergantung pada sistem impor (Jatmika, Hubungan Internasional Di Kawasan Afrika, 2016, hal. 39). Selain memberikan keuntungan dalam dimensi politik, Afrika juga merupakan kawasan yang memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi yaitu, dengan adanya potensi *customer market* bagi negara industri seperti China. Fakta-fakta tersebut semakin menegaskan peran Afrika yang penting bagi China sebagai negara dengan

basis industri yang memiliki kebutuhan dalam sektor import bahan baku, pemasaran produk industri, serta pelayaran maritim internasional.

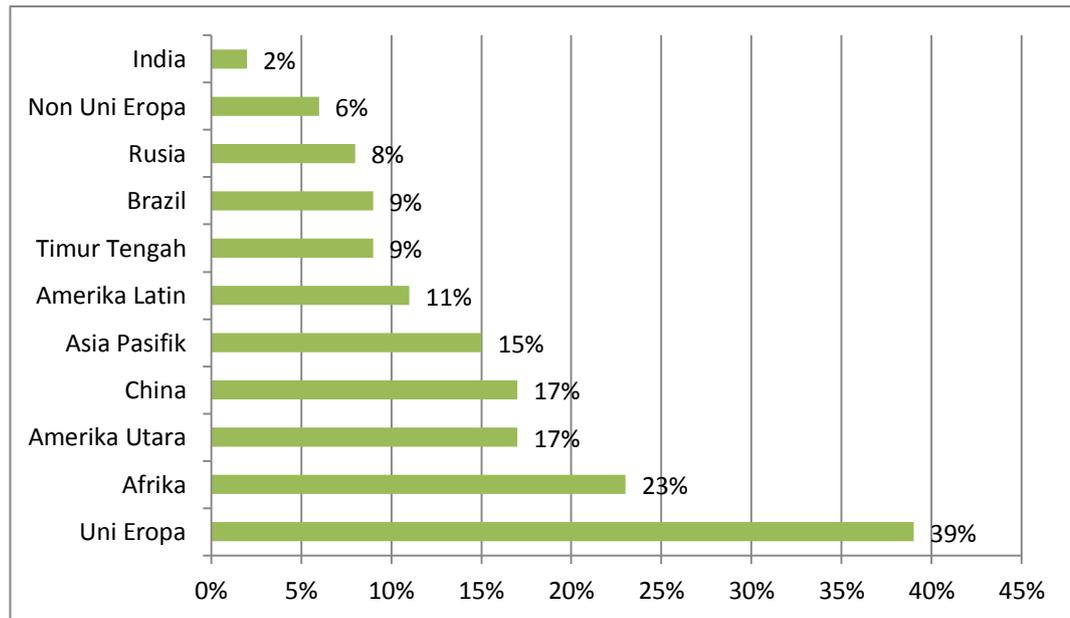
China sangat memfokuskan perhatiannya pada pentingnya jalur keamanan laut seperti di Selat Taiwan, Malaka, Hormuz dan Suez Kanal. Sedangkan Djibouti merupakan wilayah negara yang terletak di tempat penting Selat Bab el-Mandeb yang merupakan rute pengiriman yang menghubungkan Laut Mediterania, terusan Suez dan Laut Merah ke Samudra Hindia dan Pasar Asia yang merupakan jalur *China Maritime Silk Road*, khususnya untuk aktivitas perdagangan internasional (Orion, 2016, hal. 1).

Dengan faktual adanya hubungan erat antara China dengan geografis Djibouti, Afrika sebagaimana terurai dalam pembahasan di atas maka perlu bagi China untuk memutuskan membangun sebuah pangkalan militer di wilayah tersebut, selain secara geografis Djibouti, Afrika merupakan wilayah strategis bagi keberlangsungan berbagai aktivitas China baik dalam bidang politik, ekonomi dan bahkan militer. Pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika juga memiliki makna sebagai alat penjaga stabilitas segenap aktivitas-aktivitas tersebut di masa mendatang.

Selain terdapat aspek pertimbangan geografis dalam penyusunan kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016. Secara konteks internasional juga terlihat atas adanya peran aspek ekonomi di kawasan Afrika yang turut mewarnai lahirnya kebijakan tersebut di negara China. Pasalnya, negara tirai bambu ini pada abad 21 mulai menggiatkan kegiatan ekonominya di kawasan tersebut. Secara tinjauan *consumer market*, Afrika

diprediksi pada tahun 2017 akan menjadi kawasan dengan konsumsi produk industri terbesar kedua di dunia setelah kawasan Uni Eropa (Deloitte, 2014, hal. 6).

Gambar 4.3 Prioritas *Customer Market* Global Tahun 2017

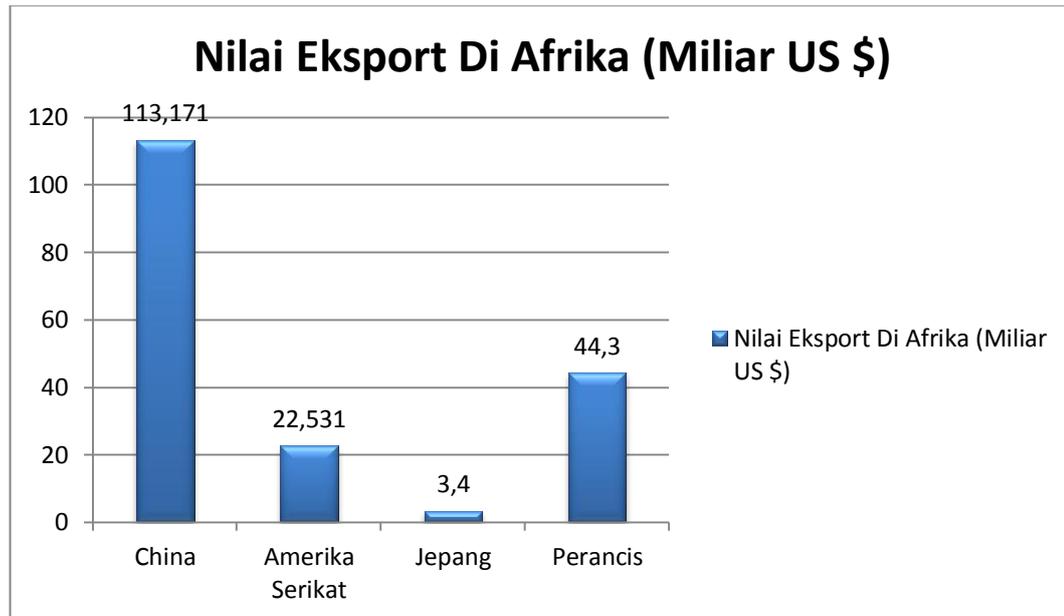


Sumber : Deloitte, *Africa: A 21st Century View* (Deloitte, 2014, hal. 6).

Gambar diagram tersebut menunjukkan bahwas terdapat potensi pasar yang begitu besar di kawasan Afrika, khususnya bagi China sebagai aktor ekonomi global yang memerlukan ruang pemasaran atas produk industri-industri domestiknya. Namun, secara konteks internasional, China bukanlah satu-satunya kekuatan asing yang memainkan peran baik secara politik, ekonomi, maupun militer di kawasan tersebut. Melainkan, berbagai aktor kekuatan global turut memberikan jejak perannya di kawasan yang kini menjadi grafitasi baru dalam berbagai sistem kerjasama internasional. Khususnya dalam bidang perdagangan internasional dan investasi internasional bagi sejumlah negara maju. Beberapa

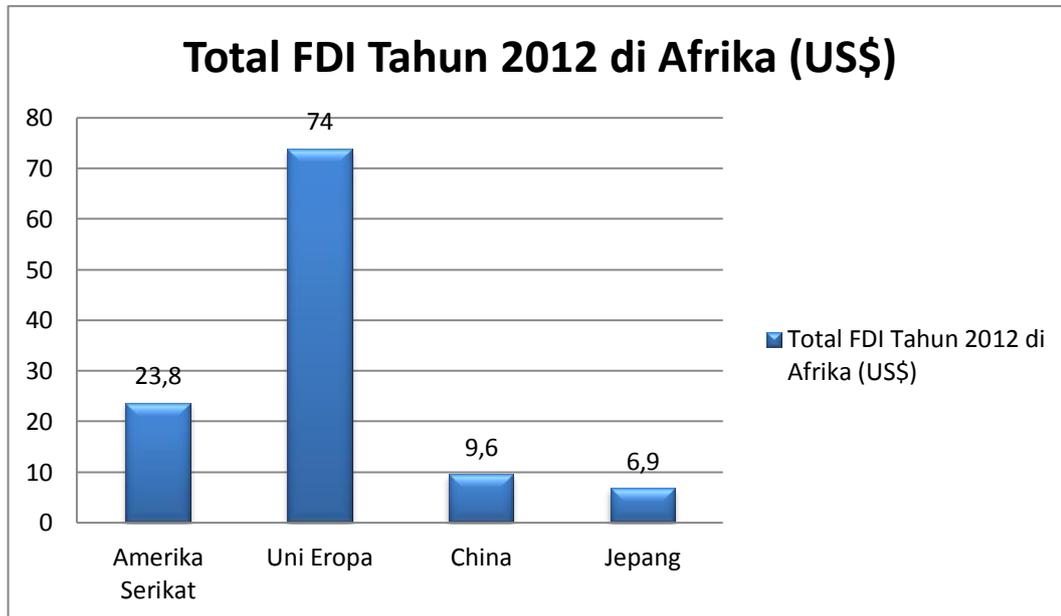
kekuatan asing tersebut ialah Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang yang secara kuantitatif memiliki peran yang juga signifikan di Kawasan Afrika. Berikut ialah tabel aktivitas ekonomi antarnegara tersebut di kawasan Afrika:

Gambar 4.4 Nilai Ekspor di Afrika Tahun 2012



Sumber : *Trading Economics, China Exports* (Economics, 2016); *US Department of Commerce, US–Sub-Saharan Africa Trade and Investment* (Commerce, 2014, hal. 5); **Sebastien Dumoulin dan Charlie Hamilton, *France-Africa: Trade Romance back on Track*** (Dumoulin & Hamilton, 2014); Taku Findira, *Japan-Africa Trade at A Glance* (findira, 2014, hal. 4)

Gambar 4.5 *Foreign Direct Investment* di Afrika Tahun 2012



Sumber : Andre Corrta d'Almeida, U.S. "vs." China in Africa: A Message to President Obama and Premier Li Keqiang (d'Almeida, 2014)

Pemaparan-pemaparan terkait dua aktivitas ekonomi berbagai kekuatan asing di Kawasan Afrika tersebut di atas telah memberikan gambaran secara global bahwa China mendapatkan peringatan atas upaya negaranya dalam melakukan aktivasi interaksi kemitraan di kawasan Afrika. China bukan menjadi kekuatan tunggal yang berperan di kawasan tersebut. Melainkan China bagian dari segelintir kekuatan asing yang mampu melihat potensi wilayah Djibouti khususnya dan Afrika secara luas. Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam menjaga hubungannya dengan wilayah dan kawasan tersebut. Meskipun dalam segi perdagangan internasional, China menjadi aktor dominan di kawasan, Namun, dalam segi aktivitas investasi internasional total nilai FDI China masih tertinggal ajuh dengan Amerika dan Uni Eropa di Kawasan Afrika.

Terdapat corak utama yang dapat dilukiskan dalam melihat kompleksitas kekuatan asing baik di Djibouti, ataupun di kawasan Afrika. Hal tersebut ialah terkait adanya penyelarasan penggunaan kekuatan ekonomi dan militer secara terpadu. Militer menjadi instrumen negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Prancis dalam menciptakan stabilitas kawasan yang dapat menopang laju perekonomian yang dijalankan di Djibouti dan kawasan Afrika. Namun, China sejak terjalinnya kemitraan pada tahun 1956 di kawasan Afrika, negara tersebut hanya terfokus pada operasional kekuatan ekonomi. Meskipun secara data terlihat aktivitas ekonomi China mengungguli dari negara lainnya. Hal ini telah memberikan sinyal tersendiri bagi China untuk kemudian merestrukturisasi strategi kemitraan di negara dan kawasan yang sangat berperan penting bagi laju kemajuan negaranya tersebut. Oleh karena itu, pembangunan militer menjadi salah satu respon dari situasi-situasi riil yang dihadapi China secara internasional, khususnya yang terjadi di negara Djibouti dan kawasan Afrika. Sedangkan secara kawasan, Djibouti, Afrika merupakan wilayah yang memiliki nilai geostrategis tinggi bagi negara-negara yang memiliki fokus pada bidang perdagangan dan investasi. Selain itu, selaras dengan tujuan pertahanan militer negara China dimana pemerintah secara jelas memberikan landasan operasional atas aktivitas militer negaranya bahwa tugas angkatan bersenjata (militer) negara adalah untuk mengkonsolidasikan pertahanan nasional, membendung agresi, mempertahankan tanah air, berpartisipasi dalam konstruksional dan berjuang untuk melayani masyarakat karena pada saat ini China sedang dihadapkan pada tugas berat untuk membangun dan meningkatkan

perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu tugas pertahanan militer harus mendukung dan melayani untuk pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh (Andrean, 2015, hal. 4).

Selain aspek geografis dan ekonomi juga terdapat aspek politik dilingkungan internasional yang turut mendorong China untuk kemudian pada tahun 2016 memutuskan untuk membangun pangkalan militer negaranya di Djibouti, Afrika. Aspek politik tersebut erat kaitannya dengan adanya keputusan Pemerintah Jepang pada tahun 2010 atas kebijakan “*Pivot To Africa*”. Pada tahun 2010 politik luar negeri Jepang mengalami peningkatan untuk Kawasan Afrika seiring dengan komitmen Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai negara Afrika baik dalam politik, ekonomi dan militer. Tanda-tanda dari adanya perubahan poros Jepang ke kawasan tersebut dapat dilihat pada akhir Bulan Agustus 2016. Ketika Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menghadiri *The Six International Conference on Africa Development (TICAD)* dimana juga dihadiri 54 negara-negara Afrika serta beberapa organisasi internasional. Dalam konferensi tersebut, Jepang menjanjikan akan memberikan investasi negaranya pada berbagai proyek infrastruktur di seluruh benua selama tiga tahun dengan total nilai investasi mencapai US\$ 30 miliar (Miller, 2016). Selain itu, Jepang sebagai mitra kompetisi China baik di regional ataupun tatanan global juga telah memiliki instalasi pangkalan militer di Afrika, tepatnya juga di Negara Djibouti sejak tahun 2011. Secara internasional, hal ini telah menjadi alasan kuat bagi China untuk membangun suatu formulasi kemitraan yang lebih kuat di Kawasan Afrika. Penguatan peran tersebut tidak saja berpedoman pada aktivitas ekonomi

dna politik, namun juga dalam bidang militer. Oleh karena itu, pada tahun 2016 China memutuskan untuk membangun pangkalan militer negaranya di Djibouti, Afrika.

B. Dukungan Kuat *The Communist Party of China* dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Pangkalan Militer

Kebijakan politik luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan hasil dari perpaduan dan refleksi antara elemen-elemen yang ada di dalam kondisi domestik negara yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional (Wuryandari G. , Elisabeth, Mashad, Muna, & Sriyanto, 2011, hal. 1). Demikian pula halnya dengan kebijakan mutakhir China yang cukup menarik perhatian komunitas global dengan kebijakan pembangunan pangkalan militernya di Negara Djibouti, Afrika pada tahun 2016 ini. Konsep dasar dari kebijakan seperti yang perkenalkan Ganewati Wuryandari dan rekan dalam penelitian yang telah terbukukan, Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional, selaras dengan hasil pemikiran teoritik dari William D. Coplin dalam model kebijakan politik luar negerinya. Coplin menjelaskan bahwa politik dalam negeri suatu negara memiliki peran signifikan dalam penyusunan politik luar negeri. Peran tersebut ialah adanya ruang interaksi yang saling mempengaruhi antara aktor-aktor politik dalam negeri dengan aktor pengambil kebijakan keputusan politik luar negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri negara mereka

(Coplin & Marbun, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal. 74).

Peran politik dalam negeri terhadap penyusunan politik luar negeri suatu negara sebagaimana terjelaskan dalam Teori William D. Coplin, Kebijakan Politik Luar Negeri, dimobilisasi oleh aktor-aktor politik yang dalam teori disebut sebagai *policy influencers*. Sebagaimana telah terpaparkan dalam penjelasan dalam landasan teoritik pada bab pertama, terdapat empat tipe *policy influencers* dalam politik dalam negeri suatu negara kaitannya dengan penyusunan politik luar negeri yaitu, (1) birokratis, (2) kepentingan, (3) Partai, (4) Massa yang mempengaruhi. Setiap *influencers* memiliki kontribusi masing-masing dalam penyusunan politik luar negeri suatu negara. Selain itu, setiap negara memiliki karakter yang berbeda sehingga tidak jarang terdapat tipe dominasi *influencer* yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung dari sistem politik dalam negeri negara tersebut.

Kebijakan politik luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan hasil dari perpaduan dan refleksi antara elemen-elemen yang ada di dalam kondisi domestik negara yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional (Wuryandari G. , Elisabeth, Mashad, Muna, & Sriyanto, 2011, hal. 1). Kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 merupakan keputusan politik dari China. Kaitannya dengan aktor *policy maker*, dalam sistem politik China dikenal adanya hubungan vertikal power sebagai struktur kekuasaan negara dengan basis ideologi komunis yang geliat dan pengaruhnya kini dapat terukur sebagai aktor skala

global. Tiga vertikal power tersebut ialah keberadaan The Communist Party of China (CPC), The State Council dan The People's Liberation Army (PLA). Terlepas dari adanya *overlapping* atau tumpang tindih dalam aspek fungsi antara CPC dan The State Council karena keduanya memiliki pemimpin yang sama, namun kaitannya dengan penyusunan politik luar negeri China, ketiga aktor tersebut merupakan *official foreign policy actors* di China (Jokobson & Knox, 2010, hal. 4). Bertolak kembali pada kebijakan pembangunan pangkalan militer china di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 maka secara berkesinambungan akan dipaparkan terkait pembahasan mengenai ketiga aktor tersebut dalam penyusunan politik luar negeri China yang cukup memiliki spektrum yang berbeda dari karakter kebijakan sebelumnya pada bidang militer. Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan pada berbagai data sekunder eleven pada pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka terdapat satu dominasi *policy influencers* dalam penyusunan kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016. Yaitu partai yang mempengaruhi. Berikut ialah pemaparan terkait peran *The Communist Party of China* sebagai *influencer* dalam penyusunan kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016.

Partisan Influencer merupakan tipe *policy influencer* dari aktor politik dalam negeri suatu negara dimana terdapat keberadaan suatu partai politik yang dapat mempengaruhi penyusunan suatu politik luar negeri di negaranya. Dalam sistem politik dengan partai tunggal maka peran *partisan influencer* atau partai yang mempengaruhi mempunyai peran yang kuat dan kendali yang kuat dalam

penyusunan politik luar negeri (Coplin & Marbun, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal. 84). Kaitannya dengan China dan kebijakan pembangunan pangkalan militer negaranya di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 maka akan terlihat jelas peran dari The Communist Party of China (CPC) dalam pembentukan kebijakan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam struktur politik China terdapat ketimpangan fungsi antara struktur *The Communist Party of China* dan *The China Government* karena keduanya memiliki pemimpin yang sama yaitu, presiden yang sedang berkuasa yang juga merupakan sekretaris jenderal dari politbiro China yang merupakan lembaga tertinggi di CPC yang berwenang dalam menyetujui kebijakan-kebijakan yang ada di China.

Kaitannya dengan kebijakan pangkalan militer tersebut, CPC memiliki peran dengan adanya visi yang untuk membangun kekuatan militer China secara global. Konseptualisasi "*China Global Maritime Power*" merupakan respon dari pertumbuhan dramatis dalam kepentingan ekonomi dan keamanan China di Luar Negeri selama dua dekade terakhir. Konflik Laut China Selatan telah menyadarkan China atas pentingnya mereformasi sistem maritimnya secara global. Hal ini menyangkut fakta adanya kontrol dominan maritim yang dipegang oleh negara-negara yang mempunyainya *maritime power* seperti Filipina dan Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Xi Jinping yang juga merupakan Sekretaris Jenderal dari Politbiro The Communist Party of China, membuat visi "*China as Global Maritime Power*" pada tahun 2030 (McDevitt, 2016, hal. 12). Pada Kongres

CPC ke-18 pada Bulan November 2012, The Communist Party of China memutuskan secara bersama dalam “*build China into a strong maritime power*” sehingga dapat mendorong China tampil sebagai aktor maritim global. Para pemimpin China mengungkapkan bahwa tujuan dari hal tersebut ialah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, pengamanan kedaulatan nasional dan kebutuhan masa depan China. Kongres ke-18 tersebut juga telah menjadi momen penting bagi China untuk memulai babak baru melalui pelebaran poros kekuatan nasionalnya yaitu, pada aspek maritim. Hal ini juga menjadi penanda bahwa kepemimpinan The Communist Party of China kini telah berorientasi pada kerja politik yang menjadikan pembangunan kekuatan maritim sebagai bagian penting untuk mencapai tujuan nasional China dan juga merespon adanya dominan kekuatan maritim yang masih tersentral bagi Amerika Serikat (Bickford, 2016, hal. 1-2). Oleh karena itu, pembangunannya pangkalan militer China di Djibouti, Afrika merupakan kebijakan yang selaras dengan visi CPC dalam menjadikan jalur maritim sebagai jalur untuk mencapai kepentingan nasional China, termasuk dalam pengamanan jalur perdagangan maritim China di kawasan Afrika.

“*China as A Maritime Power*” merupakan *grand-vision* Xi Jinping selaku Sekretaris Jenderal CPC untuk secara serius membangun dan mengembangkan kapabilitas-kapabilitas China sebagai aktor yang geliat dan pengaruhnya dapat diperhitungkan secara konteks internasional (Bickford, 2016, hal. 1-2). Menurut peneliti senior, Thomas J. Bickford, Xi Jinping memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya membangun kekuatan militer China

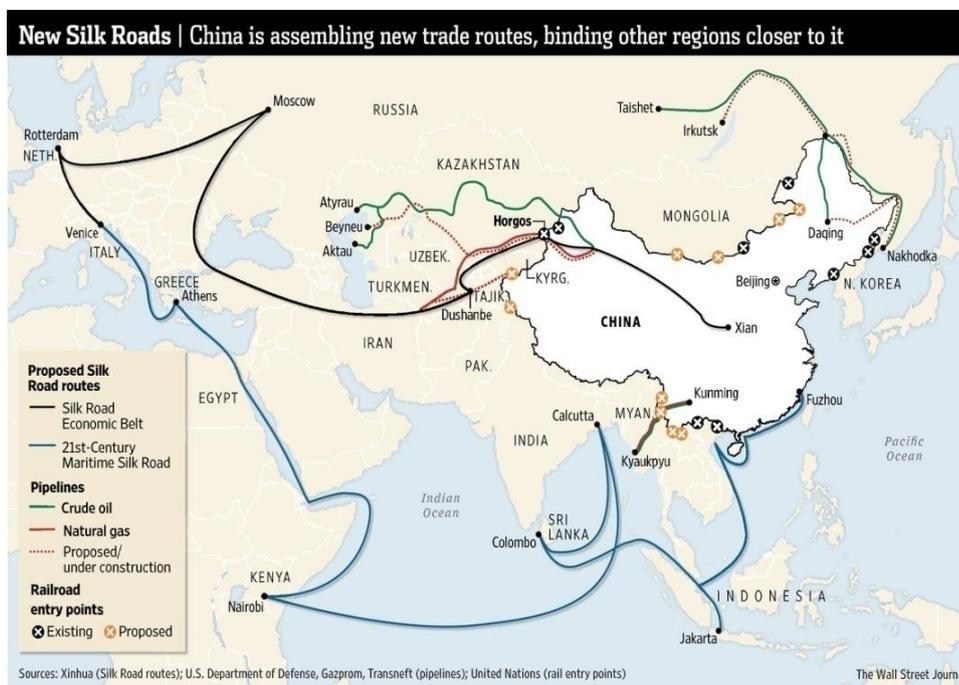
lebih masive ditatanan domestik maupun internasional. Hal ini tidak lain karena menurut Xi Jinping, negara yang besar seperti China hanya dapat dijaga stabilitasnya atas adanya peran militer yang kuat. Kekuatan militer tersebut akan mendorong pembangunan China secara strategis dalam beberapa hal lainnya seperti, politik dan ekonomi. Selain itu, Xi Jinping juga menjelaskan bahwa China merupakan negara yang memiliki sejarah kuat sebagai kekuatan maritim global pada masa lampau sehingga penting baginya untuk membangun kekuatan tersebut kembali.

Selain visi tersebut, Xi Jinping merupakan pemimpin partai yang sangat konsen dalam memperhatikan pembangunan China tidak saja secara domestik, melainkan secara global. Salah satu kebijakan strategisnya dalam penguatan perekonomian perdagangan global yaitu, kebijakan *One Belt One Road (OBOR) as China's Vision of Connectivity*. Salah satu kebijakan untuk urusan luar negeri China, Xi Jinping memilih untuk menerapkan kebijakan visi strategisnya yaitu, *One Belt One Road* yang merupakan bagian dari upaya China untuk menguatkan peran ekonominya di “*New Silk Road*” atau “Jalur Sutera Baru”. Narasi *Silk Road* merupakan sejarah kuno dan China ingin tetap menjadikan jalur sutera sebagai bagian dari jalur pertumbuhan ekonominya secara global (Aris, 2016, hal. 1).

Melalui kebijakan *One Belt One Road*, China berupaya untuk membangun satu sistem infrastruktur sebagai pintu perjalanan bagi China untuk beraktivitas secara lebih intens ke seluruh penjuru dunia (connectiity function). Konektivitas tersebut dibangun dengan tujuua untuk mendorong

peningkatan hubungan perdagangan antara Eurasia, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, serta Afrika. Visi pembangunan konektivitas tersebut telah juga menyita perhatian publik global (Aris, 2016, hal. 1). Oleh karena itu, relevan dengan konsep pangkalan militer yang dibangun China di wilayah Djibouti, Afrika yang merupakan basis logistik untuk mendorong stabilitas aktivitas perdagangan China di kawasan Afrika serta sepanjang laut hindia dan Teluk Aden melalui kebijakan *New Silk Road China* yaitu, *China Maritime Silk Road* dari sebelumnya negara masih mengandalkan jalur sutera secara daratan. Berikut merupakan rute *China Maritime Silk Road* dimana terlihat salah satu lokasi jalur mengarah pada kawasan samudera yang menuju ke Afrika dan Terusan Suez sebagai lokasi yang dekat dari Djibouti, Afrika.

Gambar 4. 6 *China Maritime Silk Road Route*



Sumber : Wall Street Journal, China Sees Itself at Center of New Asian Order (Page, 2014)

C. Tantangan Penguatan Peran Ekonomi dan Militer China di Kawasan Afrika

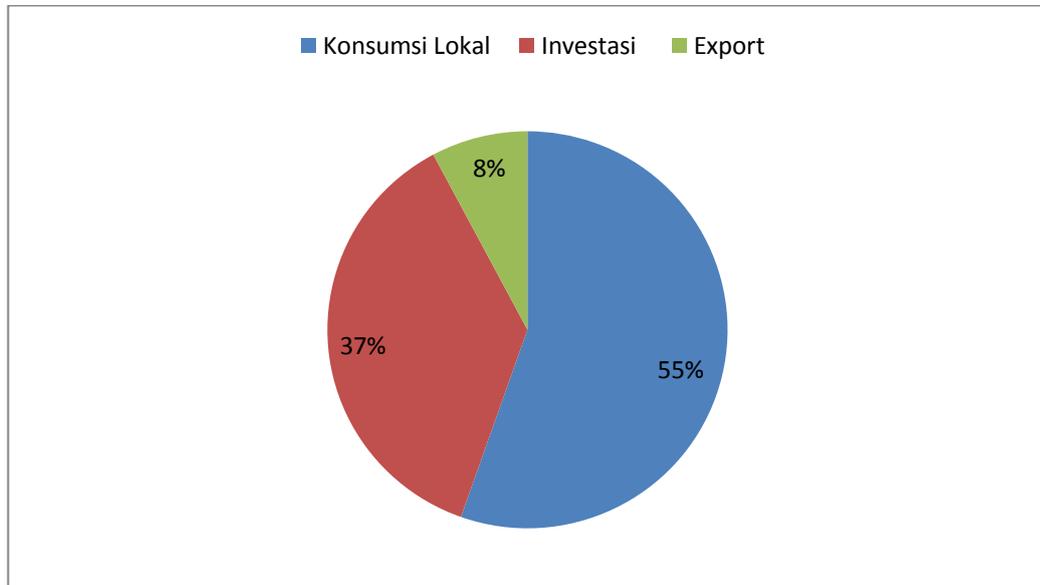
Kebangkitan China dan upayanya untuk menegaskan perannya sebagai negara berpengaruh baik ditatanan kawasan ataupun secara global, salah satunya dapat dilihat dari arsitektur ekonomi yang telah dibangun negara baik secara domestik maupun internasional. Secara ekonomi, China telah mereformasi sistem ekonominya menjadi salah satu kekuatan ekonomi di kawasan dan semakin diperhitungkan di dunia. Negara tirai bambu ini juga telah menjadi mitra dagang utama negara-negara di kawasan dan mulai menggeser posisi Jepang dan Amerika Serikat (wuryandari, Mashad, Muna, & Sriyanto, 2011, hal. 48). Reformasi ekonomi China telah dimulai pada tahun 1979 di bawah pemerintahan Presiden Deng Xio Ping.

Pasca reformasi kebijakan ekonomi dari pintu tertutup menjadi kebijakan terbuka, China tumbuh dengan pencapaian tingkat ekonomi mencapai angka 9 persen antara tahun 1979 dan 1990. Pada periode tersebut, banyak penstudi yang percaya bahwa China tidak akan mampu melanjutkan pertumbuhan ekonominya dengan progresif. Namun, berlawanan dengan berbagai prediksi yang diberikan. Para rentang periode 1990-2010, China tampil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai angka 10,4 persen. Peningkatan secara konsisten ini telah mampu merubah status China dalam perekonomian global. Hingga kini, China hadir sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia dan menghasilkan 9,3 persen dari *Gross Domestic Products* (GDP) global (Lin, 2015, hal. 214). Disamping itu, negara

ini juga aktif dalam forum perekonomian dunia, baik kemitraan yang bersifat multilateral maupun forum bilateral melalui kerjasam FTA (*Free Trade Agreement*) diberbagai penjuru dunia.

Dibalik pertumbuhan pesat ekonomi China tersebut, transformasi secara struktur yang cukup dramatis, khususnya pada bidang urbanisasi yang cepat dan industrialisasi telah membawa spektrum ekonomi baru bagi China. Pada awal ekonominya, China merupakan negara yang sangat mengandalkan roda ekonomi pada sektor agraris. Namun, reformasi ekonomi telah membawa China tumbuh menjadi negara industri berbasis produksi. Saat ini, sektor manufaktur merupakan sektor produksi untuk ekspor China secara global (Lin, 2015, hal. 215). Dengan demikian dapat ditarik satu benang merah bahwa aktivitas ekonomi China yang bersifat lintas negara merupakan kegiatan ekonomi utama yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kemajuan China, baik berupa aktivitas ekspor ataupun investasi. Berikut ialah diagram dari persebaran sektor sumber pendapatan China hingga China dapat tumbuh sebagai aktor ekonomi yang diperhitungkan secara Global pada abad 21.

Gambar 4.7 *Gross Domestic Product (GDP) China pada tahun 2016*



Sumber: *Trading Economics, China GDP Annual Growth Rate* (Economics, China GDP Annual Growth Rate, 2016)

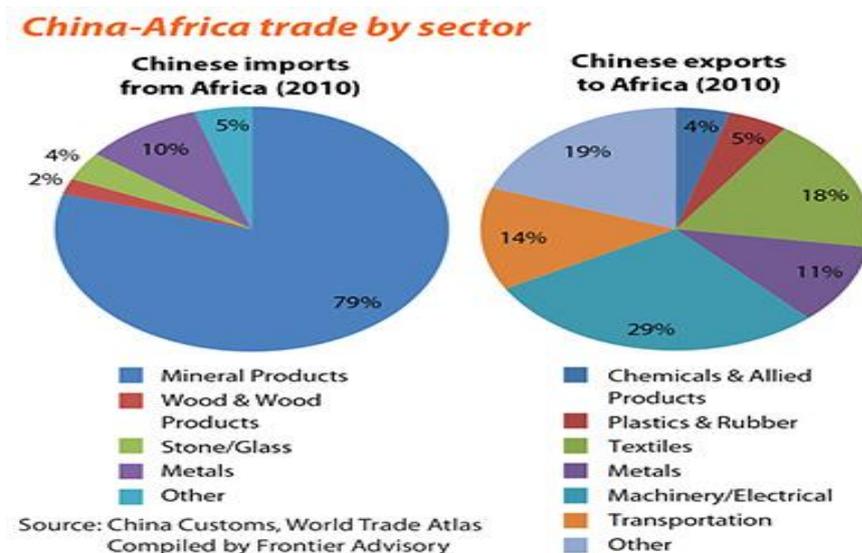
Diagram di atas menjadi penegas atas adanya tiga sumber ekonomi utama bagi China yaitu, konsumsi dari domestik rakyat China, investasi dan aktivitas ekspor hasil industri China. Apabila dicermati lebih lanjut maka, ketiga sumber tersebut dapat ditarik benang merah bahwa keberadaan industri dan investasi merupakan dua roda penggerak ekonomi China. Hal ini dikarenakan melihat tingginya sumbangan angka konsumsi dalam negeri China yaitu mencapai 55,4 persen dari total GDP China pada tahun 2016 merupakan bagian dari konsumsi hasil produk industri China. Dalam hal ini industri China memainkan dua peran penting dalam perekonomian China yaitu, aktivitas ekspor dan import. Selain industri dengan dua aktivitas yang melekat tersebut, investasi juga menjadi sektor andalan China dalam membangun perekonomian negaranya hingga pada tahun 2016 dapat mencapai angka 9,79 persen (Economics, China GDP Annual Growth

Rate, 2016). Dipertegas dengan laporan tertulis dari Andong Zhu dan Daud M. Kotz, dua peneliti dari Tsinghua University China dan University of Massachusetts Amherst Amerika Serikat dengan judul penelitian *The Dependence of china's Economic Growth on Exports and Investment*, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi China sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekspor hasil industri dan investasi asing yang dilakukan negaranya. Oleh karena itu, dua hal tersebut merupakan penopang perekonomian China yang harus senantiasa dikelola dan diperhatikan perkembangannya oleh negara (Zhu & Kotz, 2010, hal. 1). Oleh karena itu, dalam melihat perekonomian China, industri dan investasi merupakan dua hal yang membuka pintu dari negara tirai bambu tersebut menjadi kekuatan ekonomi baru global abad 21.

Salah satu kawasan penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi China, khususnya pada aktivitas industri (ekspor dan import) serta investasi pada abad 21 ini ialah Afrika. Kecenderungan aktivitas ekonomi China baik dalam bidang investasi dan ekspor produk industri di kawasan tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah China terkait '*pivot to africa*' pada tahun 2012 (Brooks, 2012) . Termasuk dalam aktivitas ekonomi yang dibangun dan dijalankan China di Djibouti sebagai lokasi tujuan kebijakan politik luar negerinya yaitu, pembangunan pangkalan militer China. Begitu banyak jejak aktivitas ekonomi baik ekspor dan impor yang melibatkan China baik dengan Djibouti secara langsung, maupun dengan berbagai negara di kawasan Afrika secara luas.

Dalam skala regional atau kawasan, China memiliki sejumlah aktivitas-aktivitas ekonomi di berbagai negara kawasan Afrika. Dalam tinjauan aspek aktivitas ekspor dan import sebagai dua agenda yang tidak dapat terpisahkan dalam menjaga stabilitas laju industrialisasi negara China, maka perlu kiranya untuk melihat secara riil terkait aktivitas China di kawasan baik dalam dimensi ekspor produk industrinya ataupun import sejumlah faktor produksi dari Afrika ke negaranya.

Gambar 4.8 Aktivitas Ekspor dan Impor China-Afrika Tahun 2010



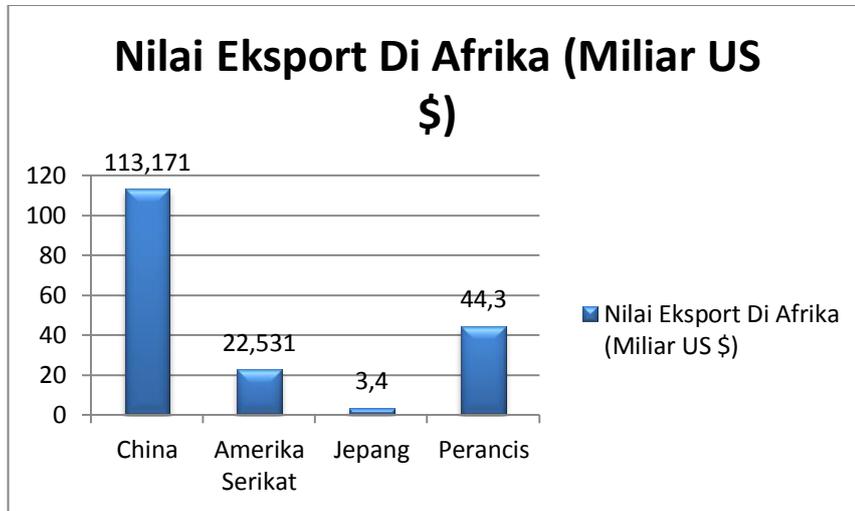
Sumber : Africa Research Institute, *Between Extremes: China and Africa* (Institute, 2012)

Gambar tersebut diatas menunjukkan adanya hubungan timbal balik secara intens antara China dan Afrika. Sebagai aktor industri global, tentunya China membutuhkan pasokan sumber daya alam sebagai faktor produksi dan cadangan energi. Sedangkan Afrika, sebagai negara yang belum mampu membangun sistem produksi mandirinya membutuhkan mitra strategis yang dapat menyuplai berbagai

komoditas kebutuhan masyarakat di negaranya. Meskipun secara kalkulasi, nilai ekspor dan impor yang terjadi masih cenderung memberikan keuntungan kepada China. Keterlibatan kemitraan dengan Afrika telah memberikan konsekuensi positif bagi China, khususnya pada pertumbuhan ekonomi yang sangat mencolok. *Foreign Direct Investment* (FDI) China sebagai sektor utama pemasukan kapital negara, meningkat tiga kali lipat antara tahun 2003 dan 2011 dengan total nilai US\$ 14.7 miliar. Pada tahun 2012, China memberikan pinjaman financial kepada Afrika selama tiga tahun dengan total nilai US\$ 20 miliar untuk infrastruktur, pertanian dan manufaktur di kawasan Afrika. Dengan hal ini, China telah tampil sebagai aktor pendukung utama bagi keuangan di Afrika. China merupakan mitra perdagangan yang sangat dihormati di Afrika. Perdagangan dua arah tumbuh dari US \$ 10,6 miliar pada tahun 2000 menjadi US\$ 16.6 miliar pada tahun 2011 (Institute, 2012).

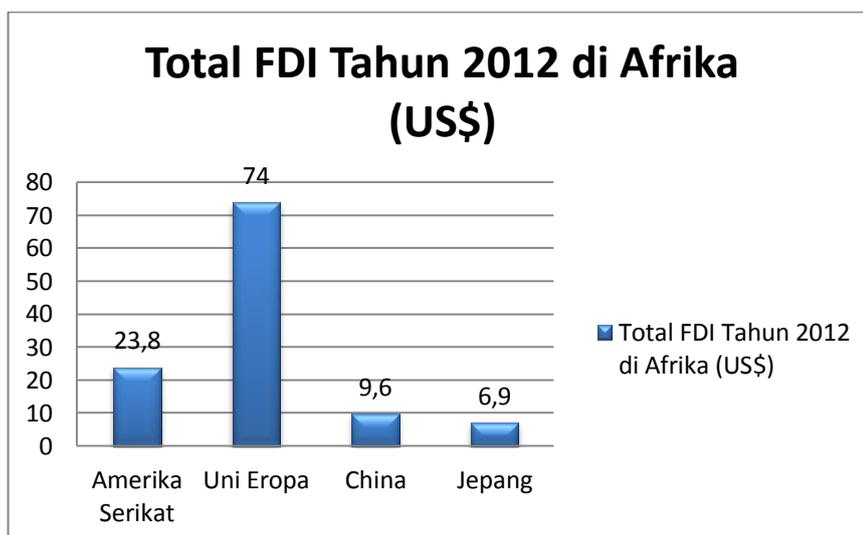
Meskipun China bukan satu-satunya aktor ekonomi di kawasan tersebut, namun China merupakan negara dengan dominasi aktivitas ekonomi terkuat pada bidang perdagangan di kawasan Afrika jika dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari paparan diagram di bawah ini.

Gambar 4.9 Nilai Eksport di Afrika Tahun 2012



Sumber : *Trading Economics, China Exports* (Economics, 2016); *US Department of Commerce, US–Sub-Saharan Africa Trade and Investment* (Commerce, 2014, hal. 5); **Sebastien Dumoulin dan Charlie Hamilton, *France-Africa: Trade Romance back on Track*** (Dumoulin & Hamilton, 2014); Taku Findira, *Japan-Africa Trade at A Glance* (findira, 2014, hal. 4)

Gambar 4.10 *Foreign Direct Investment* di Afrika Tahun 2012



Sumber : Andre Corrta d'Almeida, *U.S. "vs." China in Africa: A Message to President Obama and Premier Li Keqiang* (d'Almeida, 2014)

Data terpapar dalam diagram batang tersebut menunjukkan adanya dominasi aktivitas ekonomi China di Kawasan Afrika di tengah pusaran kepentingan ekonomi kekuatan asing lainnya di kawasan pada aktivitas perdagangan internasional. Dominasi ini menjadi indikasi kuat atas peran China di Kawasan Afrika yang tidak dapat dipandang rendah. Afrika telah menjadi mitra ekonomi penting bagi China dengan nilai ekspor mencapai US\$ 113,171 dan menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan tiga kekuatan asing lainnya di kawasan tersebut yaitu, Amerika Serikat dengan nilai ekspor mencapai US\$ 22,531, Perancis US\$ 44,3, dan Jepang mencapai US \$ 3,4 pada tahun 2012. Selain memiliki jalinan perekonomian yang kuat dengan kawasan, China juga memiliki jalinan ekonomi yang kuat dengan Djibouti, sebagai wilayah tujuan politik negaranya yaitu, pembangunan pangkalan militer pertama negaranya di luar negeri. Meskipun demikian, situasi internasional atas adanya peran Amerika Serikat dan Uni Eropa yang masih tampil sebagai aktor investasi di kawasan menjadi tantangan bagi China untuk menata kembali strategi kemitraannya agar dominasi tersebut tetap berada dipihak China. Meskipun demikian apabila dicermati, China tetaplah menjadi raksasa ekonomi di Afrika. Meskipun ada ketimpangan dominasi antara aktivitas perdagangan dan investasi antara China dengan negara lainnya di kawasan tersebut. Namun, secara kalkulasi nilai total aktivitas ekonomi, China menjadi aktor terkuat dengan total perdagangan dan investasi mencapai US\$ 122,771 miliar dan Amerika Serikat dengan total di bawah China yaitu, US\$ 46,331 miliar.

Secara aktivitas ekonomi China di Djibouti, Afrika. China juga memiliki aktivitas-aktivitas ekonomi cukup banyak di wilayah ini. Kerjasama ekonomi yang terjalin, baik dalam sektor investasi, maupun ekspor dan import. Berikut ialah pemaparan data terkait aktivitas ekonomi China di Djibouti, Afrika. Jalanan kemitraan kedua negara telah dimulai sejak 8 Januari 1979, namun secara strategis, kedua negara baru meningkatkan aktivitas-aktivitas kerjasama pada beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2012 dan 2013, China telah tegas untuk lebih aktif berperan dalam berbagai proyek infrastruktur di wilayah Djibouti dengan tafsir nilai angka mencapai miliaran US dolar. Setidaknya, dalam beberapa terakhir terdapat beberapa sektor investasi yang sedang dikerjakan China di negara tersebut yaitu, pembuatan pelabuhan baru, dua bandara baru, kereta api Ethiopia-Djibouti, terminal curah (untuk kalium) di Tadjourah, pabrik ekstraksi garam di Danau Assal, air, gas, dan pipa minyak, dan pabrik pencairan (Dubé, 2016). Menurut Francois Dube, jurnalis dari *The Diplomat* sebagai suatu situs penyedia berbagai laporan berita global, adanya sikap China dalam memutuskan untuk membangun sebuah pangkalan militer negaranya di Djibouti, erat kaitannya dengan kebutuhan China dalam memelihara harmonisitas hubungan bilateralnya dengan Djibouti, khususnya terkait dengan pengamanan aktivitas ekonomi negaranya di wilayah tersebut.

Data-data terpapar diatas merupakan wujud riil adanya aktivitas ekonomi yang sangat strategis baik antara China dengan Djibouti, ataupun China dengan negara di kawasan Afrika secara luas. Namun, fakta adanya rivalitas kekuatan asing yang berperan di Afrika baik dalam konteks politik, ekonomi ataupun

militer tidak menempatkan China sebagai aktor tunggal mitra kawasan. Melainkan, terdapat berbagai kekuatan asing yang juga memiliki jejak eksistensi kuat di kawasan seperti: Amerika Serikat, Prancis, Jepang dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut, telah menanamkan pengaruh baik secara politik, ekonomi dan militer di Djibouti ataupun di kawasan Afrika. Kebutuhan pemeliharaan kemitraan antara satu negara dengan negara lainnya saling tumpang tindih karena semua memiliki tujuan yang hampir sama, khususnya dalam bidang ekonomi yaitu pemeliharaan dan peningkatan aktivitas investasi, impor dan ekspor produk industri negaranya. Sedangkan dalam konteks militer, militer menjadi instrumen penting yang harus dibangun negara dalam pemeliharaan situasi stabilisasi wilayah guna mendukung kelancaran keberlangsungan roda ekonomi negaranya serta sebagai unit untuk mengamati dinamika di wilayah Djibouti dan kawasan Afrika. Oleh karena itu, perlu bagi China untuk mulai merestrukturisasi strategisnya di wilayah Djibouti dan Afrika tidak saja dalam bidang politik dan ekonomi, namun juga militer.

Menurut William D. Coplin dalam teorinya, Kebijakan Politik Luar Negeri, selain dipengaruhi oleh konteks internasional sebagai determinan politik luar negeri suatu negara. Keberadaan politik luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh adanya pertimbangan kuat dalam aspek atau konsiderasi pada kondisi ekonomi dan militer negara tersebut. Bertolak dari hal ini serta berkaitan dengan data sebelumnya, maka terlihat ada hubungan erat antara kepentingan ekonomi China di kawasan Afrika ataupun di negara Djibouti baik dalam sektor investasi, ekspor ataupun import bahan baku industri dalam negeri China dengan

kebijakan terobosan China melalui pembangunan pangkalan militer negaranya di wilayah Djibouti, Afrika pada tahun 2016 ini. Keterkaitan itu terletak pada kebutuhan China untuk mempertahankan sejumlah aktivitas-aktivitas ekonomi negaranya yang sangat tinggi di kawasan Afrika. Selain itu, fakta adanya kekuatan asing yang juga bermain di dalam kawasan tersebut, baik dalam hal ekonomi, politik, ataupun militer sebagaimana telah terjelaskan dalam pembahasan determinan konteks internasional. Menjadi tantangan tersendiri bagi China untuk menguatkan kedudukan negaranya di tengah tantangan pusran kompetisi kuat antarnegara industri dan maju di Kawasan Afrika. Pembangunan pangkalan militer China menegaskan atas adanya komitmen China untuk meningkatkan upaya ekonominya di kawasan dikarena melihat bentuk pangkalan militer yang dibangun merupakan basis logistik dari kapal-kapal komersil maupun non komersil China. Maka hal ini mengindikasikan adanya keterkaitan erat antara upaya pembangunan pangkalan militer sebagai instrumen penopang aktivitas ekonomi China di Kawasan Afrika

Pembangunan pangkalan militer memiliki arti penting bagi China dalam menjawab tantangan kebutuhan ekonomi negaranya yaitu, pertama kebutuhan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam operasional aktivitas ekonomi ekspor, import ataupun investasi negaranya di Kawasan Afrika sebagai suatu kawasan yang sangat rentan konflik. Dengan adanya sebuah basis kekuatan militer di Djibouti, Afrika, China akan mampu memantau segala dinamika keamanan dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini juga selaras dengan aturan dalam *Defense White Papers of China* atau Buku Putih China, pemerintah secara jelas

memberikan landasan operasional atas aktivitas militer negaranya. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa China merupakan negara yang menjalankan operasi militer sebagai pengampu tugas untuk membangun dan meningkatkan perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu tugas pertahanan militer harus mendukung dan melayani untuk pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh (Andrean, 2015, hal. 4). Bertolak dari hal tersebut, selaras apabila China pada tahun 2016 memutsukan untuk membangun sebuah pangkalan militer di Djibouti, Afrika sebagai pintu masuk Kawasan Afrika dalam rangka menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan laju aktivitas ekonomi negaranya baik di negara tersebut atau di Kawasan Afrika.

Dalam konteks militer, sebagaimana Coplin sampaikan dalam teorinya. Kondisi militer negara juga menjadi salah satu determinan atau penyebab suatu negara membuat keputusan politik luar negerinya. Kaitannya dengan kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016, China memiliki tantangan besar atas kekuatan militer negaranya sehingga China harus membangun sebuah basis kekuatan militernya di Djibouti, Afrika. Tantanagn tersebut dapat dipahami dalam tiga hal yaitu,

1. Tantangan Militer Negara di Tengah Pusaran Kekuatan Militer Asing di Kawasan Afrika

Sebagaimana telah terpaparkan dalam pembahasan hipotesa pertama, terlihat data yang jelas akan adanya ketimpangan kekuatan yang dibangun China di kawasan Afrika. Ketimpangan tersebut ialah tidak adanya kesetaraan kekuatan yang dibangun China pada bidang ekonomi dengan militer

negaranya. China merupakan negara terbesar sebagai mitra ekonomi Afrika jika dibandingkan berbagai kekuatan asing lainnya di kawasan seperti Amerika Serikat, Perancis dan Jepang. Meskipun nilai aktivitas ekonomi ketiga negara tersebut jauh di bawah nilai ekonomi China di Afrika, namun ketiga negara tersebut telah memberikan pengaruh besar pada kawasan dengan adanya kekuatan militer yang mereka bangun. Kekuatan militer yang terbangun tersebut ialah menyangkut adanya pangkalan militer ketiga negara di kawasan Afrika yang juga dilokasikan di kawasan geostrategis Djibouti. Oleh karena itu, kekuatan militer China dibenturkan pada tantangan internasional di kawasan untuk menegaskan peranannya di kawasan sebagai satu-satunya aktor terkuat baik dalam aspek ekonomi ataupun secara militer. Pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016 menjadi jawaban atas ketimpangan dominasi kekuatan yang dibangun China di kawasan tersebut.

2. Tantangan Militer China dalam Merespon Tindak Pembajakan di Kawasan Laut Somalia (*Anty-Piracy*)

Militer memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan kehidupan di China. Pasalnya, militer menjadi instrumen dalam mengkonsolidasikan pertahanan nasional, membendung agresi, mempertahankan tanah air serta mendukung pembangunan ekonomi nasional China. Berkenaan dengan hal tersebut, sejak tahun 2008 China mulai terlibat aktif dalam partisipasi pemberantasan tindak pembajakan di kawasan samudera hindia atau di

sekitar laut Somalia (BBC, 2010). Pasalnya, tindak kejahatan pembajakan (*piracy*) telah mengganggu stabilitas keamanan internasional sekaligus keamanan dijalur maritim China yang melewati kawasan laut Somalia.

Operasi *anti-piracy* merupakan suatu komitmen dari People Liberation's Army (PLA) angkatan laut China untuk dapat bergabung bersama kekuatan internasional lainnya dalam menjaga kewanaman disepanjang samudera hindia, khususnya di kawasan Laut Somalia. 90 persen perdaganganmaritim dan transportasi dunia melalui jalur tersebut sepanjang tahunnya. Tercatat bahwa 20.000-25.000 kapal melintasi kawasan Laut Somalia dan melakukan transit pelayaran di Teluk Aden setiap tahunnya. 1400-1600 kapal dari total tersebut ialah tarsnportasi laut kepemilikan China. Kapal tersebut berupa kapal komersil dan non komersil. Oleh karena itu, China memiliki kepentingan kuat untuk menjaga keamanan jalur lalu lintas pelayaran kapal dari negaranya (Bo, 2013). Ancaman ketidakamanan dikawasan jalur tersebut dapat dilihat dari adanya fakta sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, setidaknya telah ditahan dan diadili sejumlah 1132 *piracy* di dua puluh negara atas tindaknya di kawasan laut Somalia.

Kehadiran China di Djibouti, Afrika dengan kebijakan pembangunan pangkalan militer negaranya dengan bentuk sebuah absisi pangaklan angkatan laut menunjukkan korelasi yang kuat dengan adanya komitmen China sejak tahun 2008 untuk turut berpartisipasi alam pemberantasan tindak pembajakan di kawasan laut, khususnya di kawasan sekita Somalia

dan Teluk Aden. Dengan adanya pangkalan militer dengan berbagai kapasitas militer yang telah disediakan maka China akan lebih mudah untuk melanjutkan upayanya dalam menciptakan keamanan disenjang kawasan maritime baik di Samudera Hindia, kawasan Laut Somalia atau Teluk Aden sebagai zona maritim yang tidak jauh dari Djibouti, Afrika.

3. Dorongan Komitmen China dalam Memberikan Bantuan Kemanusiaan di Afrika

Juru Bicara Kementerian Pertahanan China menyampaikan tujuan dari dibangunnya pangkalan militer tersebut ialah untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan kerjasama PBB, semakin mengaktifkan pesisir Pantai Somalia, dukungan optimal di Teluk Aden dan memperbaiki kualitas pelaksanaan tugas perdamaian dunia (HS, 2016). Dengan adanya pembangunan pangkalan militer di wilayah Djibouti sebagai pintu masuk Kawasan Afrika secara luas, maka akan lebih mudah bagi China untuk melaksanakan perannya dalam turut menyalurkan bantuan kemanusiaan di kawasan Afrika. Terlebih, pangkalan militer tersebut merupakan suatu pangkalan yang berbasis fasilitas logistik sehingga tidak saja berisi fasilitas perawatan peralatan militer, namun pangkalan tersebut juga dapat difungsikan sebagai pendukung penyaluran logistik bantuan kemanusiaan di kawasan Afrika.

Dilansir oleh media Kompas, sejak tahun 2010 China telah aktif terlibat dalam aktivitas bantuan kemanusiaan di berbagai negara Afrika yang sedang dilanda krisis kemanusiaan. Pada tahun tersebut China

tercatat telah menyediakan bantuan senilai 70 juta dollar AS bagi negara-negara Afrika yang terkena bencana kekeringan dan kelaparan. Dari jumlah itu, 16 juta dollar AS berbentuk tunai. Dana sebesar itu dialirkan melalui Badan Pangan Dunia PBB (WFP) untuk Somalia sebagai negara terparah atas bencana krisis kelaparan dan kekeringan (Kompas, 2011).

Penegasan pernyataan dari Juru Bicara Kementerian Pertahanan China atas keterkaitan tujuan dari pembangunan pangkalan militer tersebut sebagai penopang upaya China dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan di kawasan Afrika memberikan indikasi kuat atas kondisi militer China yang memiliki tantangan untuk dapat lebih aktif dalam peran agenda *humanity* di kawasan Afrika. Oleh karena itu, pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika memiliki berbagai arti penting bagi China tidak saja dalam aspek politik, ekonomi, namun juga menyangkut upaya China dalam merespon isu keamanan dan krisis *humanity* internasional.

4. Ancaman Stabilitas Keamanan dengan Adanya *Anti-China Sentiment* di Afrika

Dalam tinjauan ekonomi, Afrika memiliki peran penting dalam mendorong katalisasi kemajuan China. Total nilai perdagangan dan investas China menduduki peringkat pertama terbesar di kawasan jika dibandingkan dengan angka yang didapatkan Amerika Serikat, Perancis dan Jepang. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab tantangan

ekonomi China, lebih dari 50 persen pendapatan utama China sangat bergantung dengan laju aktivitas investasi luar negerinya. Oleh karena itu, China sangat intensif dalam memperhatikan stabilitas keamanan baik domestik maupun internasional guna menopang laju aktivitas investasi tersebut. Pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika tidak saja menyiratkan jawaban atas tantangan keamanan yang dihadapi China di sekitar Kawasan Afrika. Namun, kebijakan tersebut juga menjadi jawaban atau respon dari adanya tantangan keamanan dari internal Kawasan Afrika.

Lahirnya *Anti-China Sentiment* atau sentimen anti China di kawasan Afrika sejak tahun 2015 menjadi kekhawatiran baru China yang tidak bisa disepelekan. *Anti-China Sentiment* ialah sebuah respon sosial atas aktivasi China di kawasan. Dimobilisasi oleh sejumlah rakyat dan buruh yang merasa dirugikan atas kehadiran China, di Madagaskar, Afrika pada tahun 2015 mulai muncul konflik dalam menentang kehadiran China dan aktivitas investasi China di wilayah tersebut dalam sektor pertambangan.

Dalam tulisan *Anti-China Sentiment Rising in Madagascar*, pada 16 Desember 2016, *The News Paper* melaporkan bahwa sejak kemunculan pada 2015 lalu, sentimen anti China mulai hadir kembali dalam tuntutan masyarakat Madagaskar. Tuntutan ini ditujukan kepada perusahaan China yaitu, Jiuxing yang merupakan perusahaan pertambangan emas China. China telah menjalin kontrak kemitraan

dengan pemerintah Madagaskar untuk melakukan aktivitas pertambangan emas selama empat puluh tahun di atas wilayah dengan luas 7.500 ha. Dalam perkembangannya, aktivitas pertambangan tersebut justru merugikan pihak rakyat di Madagaskar. Pasalnya, selain kerugian dari finansial dan terekploitasinya sumber daya alam. Tergangunya laju perairan di Madagaskar akibat aktivitas petambangan China telah mengganggu roda kehidupan masyarakat Madagaskar. Selain di Madagarkar, China juga menghadapi tantangan penolakan dari beberapa negara mitra investasi lainnya yaitu, Sudan, Angola, Zambia dan Guinea (TNP, 2016). Hal inilah yang juga mendorong China untuk meningkatkan aktivasi militernya di kawasan untuk mengendalikan dan menstabilkan gejolak masyarakat yang mulai menancam kelancaran aktivitas ekonominya di kawasan.